

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan**



**Oleh:**

**FEBRIKA NURTIYAS**

**12804241043**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH  
MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**

Oleh:

Febrika Nurtiyas

12804241043

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan di  
depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.



Yogyakarta, 22 Juni 2016

Pembimbing



Mustofa M.Sc.

NIP: 19800313 200604 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014

Oleh:

FEBRIKA NURTIYAS  
NIM. 12804241043

Telah dipertahankan di depan TIM Pengaji Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2016 dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI			
Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Daru Wahyuni, M. Si. NIP. 19681109 199403 2 001	Ketua Pengaji		20 - 7 - 2016
Mustofa, M. Sc. NIP. 19800313 200604 1 001	Sekretaris Pengaji		20 - 7 - 2016
Sri Sumardiningsih, M. Si. NIP. 19530403 197903 2 001	Pengaji Utama		18 - 7 - 2016

Yogyakarta, 21 Juli 2016

Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Sugiharsono, M.Si  
NIP. 19550328 198303 1 002

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febrika Nurtiyas

NIM : 12804241043

Jurusan : Pendidikan Ekonomi

Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum  
Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang benar.

Demikian pernyataan yang saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Yogyakarta, 22 Juni 2016



Febrika Nurtiyas

NIM: 12804241043

## **MOTTO**

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum  
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri  
mereka sendiri  
(QS Ar rad : 11)

Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah  
(HR. Turmudzi)

Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu tersebut dikerjakan dan bukan  
hanya dipikirkan. Sebuah cita-cita akan menjadi kesuksesan jika kita mengawali  
dengan bekerja untuk mencapainya

## **PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas sebagai karunia dan kemudahan yang diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan. Karya ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang dan terimakasih kepada:

- Orang tua saya tercinta Bapak Teguh, dan Ibu Tri Asyanti terimakasih atas semua pengorbanan, kasih sayang, dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.
- Suami saya tercinta Dani Hedi Wibowo terimakasih atas dorongan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk saya.

Kubingkisan karya ini untuk:

- Adikku tersayang Fenia Anggita Kartikasari, terimakasih telah menjadi saudara terbaik bagi saya yang selalu menghibur dan menyemangati dalam setiap hari saya.
- Sahabat-sahabat seperjuangan saya (Heni, Yuli, Adia, Martini, Indah, Astiti, Alma), terimakasih atas dukungan, canda tawa, dan semangat yang kalian berikan untuk saya selama ini.

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM PROPINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2010-2014**

Oleh:

FEBRIKA NURTIYAS

12804241043

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari Survei Upah Buruh (SUB) oleh BPS, Survei Biaya Hidup oleh BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel model *random effect* (REM) dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan program *EVIEWS versi 8*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa di bawah nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional 2) Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi; 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi; 4) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun, sementara penelitian lain menggunakan jangka waktu yang panjang, sekitar dua puluh tahunan; 5) Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Propinsi 6) Kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 86.73%. Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

**Kata Kunci:** Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan per Kapita, Upah Minimum Propinsi

***AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE PROVINCIAL  
MINIMUM WAGE IN JAVA ISLAND IN 2010-2014***

By:

FEBRIKA NURTIYAS

12804241043

***ABSTRACT***

*The study aimed to find out the factors affecting the Provincial Minimum Wage in Java Island in 2010-2014. This was a quantitative study. The data were obtained from the Labor Wage Survey (LWS) by the Central Bureau of Statistics (CBS), the Living Cost Survey (LCS) by CBS, the National Labor Force Survey (NLFS), and the Regional Income Special Survey (RISS) by CBS. The data analysis in the study was panel data regression analysis using the random effect model (REM) with the Ordinary Least Square (OLS) model employing the program of EVIEWS version 8.*

*The result of the study showed that: 1) the Provincial Minimum Wage in Java Island was below the average National Provincial Minimum Wage; 2) the Consumer Price Index did not significantly affect the Provincial Minimum Wage; 3) the Labor Force Participation Rate negatively affected Provincial Minimum Wage; 4) the Gross Regional Domestic Product negatively affected Provincial Minimum Wage because the study used only a short period of time is five years, while another study using a long period of time around two forties; 5) the Income per Capita positively affected Provincial Minimum Wage; and 6) the contribution of all the independent variables to account for the dependent variable was 86.73%. The remaining 13.27% was accounted for by other variables outside the model.*

**Keywords:** *Consumer Price Index, Labor Force Participation Rate, Gross Regional Domestic Product, Income per Capita, Provincial Minimum Wage*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, karunia, dan petunjuk Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014” ini dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., Rektor UNY yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi UNY yang telah memberikan ijin untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Tejo Nurseto, M.Pd., Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan banyak hal dalam masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir skripsi.
4. Mustofa M.Sc., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dengan penuh perhatian, kesabaran dan ketelitian serta memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
5. Sri Sumardiningsih, M.Si., selaku narasumber dan penguji utama yang telah memberikan arahan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu selama kuliah serta sumbangsih dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Pendidikan Ekonomi, khususnya teman-teman angkatan 2012 yang telah menjadi sahabat yang baik dalam masa perkuliahan, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan. Namun demikian, harapan besar bagi penulis bila skripsi ini

dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan menjadi satu karya yang bermanfaat.

Penulis



Febrika Nurtiyas  
NIM. 12804241043

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Pembatasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori.....	14
1. Upah .....	14
a. Pengertian Upah .....	14
b. Teori Upah Efisiensi .....	16
2. Upah Minimum .....	20
a. Pengertian Upah Minimum.....	20
b. Serikat Pekerja dan Tawar Menawar Kolektif.....	22
c. Kebutuhan Hidup Layak .....	24

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum .....	29
B. Penelitian yang Relevan .....	42
C. Kerangka Berpikir .....	48
D. Hipotesis Penelitian.....	51
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Desain Penelitian.....	52
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	52
1. Variabel Dependen.....	52
2. Variabel Independen .....	53
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Tahap-Tahap Pengolahan Data .....	56
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Deskripsi Data Penelitian .....	64
B. Analisis Data .....	70
1. Hasil Uji Asumsi Klasik .....	70
2. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel.....	73
3. Analisis Data Panel .....	74
4. Hasil Uji Hipotesis .....	75
C. Pembahasan .....	77
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
C. Keterbatasan penelitian .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa .....	3
2. Upah Minimum Propinsi di Pulau Lain .....	4
3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa.....	6
4. PDRB dan UMP di Pulau Jawa.....	8
5. Komponen Kebutuhan Hidup Layak .....	24
6. Sumber Data Penelitian .....	54
7. Kriteria Pengujian Durbin Watson.....	59
8. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	64
9. Hasil Pengujian Durbin Watson.....	71
10. Hasil Uji Chow.....	72
11. Hasil Uji Hausman .....	73
12. Hasil Estimasi Model .....	73

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir Penelitian .....	49
2. Nilai Rata-Rata Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa.....	65
3. Nilai Indeks Harga Konsumen di Pulau Jawa.....	66
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa .....	67
5. Perkembangan PDRB di Pulau Jawa .....	68
6. Rata-Rata Pendapatan per Kapita di Pulau Jawa .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Data Penelitian .....	88
2. Uji Chow .....	89
3. Uji Hausman .....	89
4. Hasil Regresi Data Panel.....	90
5. Hasil Uji Normalitas .....	91
6. Hasil Uji Multikolinieritas .....	91
7. Hasil Regresi Data Panel Jangka Waktu 7 Tahun .....	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tenaga kerja adalah pihak yang menawarkan jasa, dan mempunyai peranan penting dalam proses produksi, sehingga atas pengorbanan tersebut, tenaga kerja memperoleh imbalan jasa dari perusahaan berupa upah. Upah merupakan salah satu indikator penting untuk mencukupi hidup tenaga kerja. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarga.

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih sedikit pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan, dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka dapat hidup sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya sedikit pengusaha

yang secara sadar dan sukarela untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.

Upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha, dan pekerja, pemerintah perlu mengatur masalah pengupahan ini yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah. Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Di Indonesia, masing-masing Propinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Namun dalam penentuannya, masih ada Propinsi yang menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) di bawah nilai rata-rata UMP Nasional, khususnya di Pulau Jawa. Hampir semua Propinsi di

Pulau Jawa menetapkan UMP di bawah rata-rata UMP Nasional, kecuali DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel. 1.

Tabel 1. Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa

Propinsi	Upah Minimum Propinsi				
	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	1.118.009	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.301
Banten	955.300	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000
Jawa Barat	671.500	732.000	780.000	850.000	1.000.000
Jawa Tengah	660.000	675.000	765.000	830.000	910.000
Jawa Timur	630.000	705.000	745.000	866.250	1.000.000
DIY	745.695	808.000	892.660	947.114	988.500
Rata-Rata UMP Nasional	908.824	988.829	1.119.100	1.332.400	1.634.260

*Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014*

Sementara Pulau lain menetapkan Upah Minimum Propinsi di atas nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Upah Minimum Propinsi di Pulau Lain

<b>Provinsi</b>	<b>Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)</b>				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Aceh	1300000	1350000	1400000	1550000	1750000
Sumatera Utara	965000	1035500	1200000	1375000	1505850
Sumatera Barat	940000	1055000	1150000	1350000	1490000
Riau	1016000	1120000	1238000	1400000	1700000
Jambi	900000	1028000	1142500	1300000	1502300
Sumatera Selatan	927825	1048440	1195220	1630000	1825000
Kep. Bangka Belitung	910000	1024000	1110000	1265000	1640000
Kep. Riau	925000	975000	1015000	1365087	1665000
Kalimantan Tengah	986590	1134580	1327459	1553127	1723970
Kalimantan Selatan	1024500	1126000	1225000	1337500	1620000
Kalimantan Timur	1002000	1084000	1177000	1752073	1886315
Sulawesi Utara	1000000	1050000	1250000	1550000	1900000
Sulawesi Selatan	1000000	1100000	1200000	1440000	1800000
Sulawesi Barat	944200	1006000	1127000	1165000	1400000
Papua Barat	1210000	1410000	1450000	1720000	1870000
Papua	1316500	1403000	1585000	1710000	2040000
Rata-Rata UMP Nasional	908824	988829	1119100	1332400	1634260

*Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014*

Penetapan upah minimum didasarkan pada standar biaya hidup.

Namun, rata-rata tingkat Upah Minimum Propinsi (UMP) di Pulau Jawa masih dibawah nilai kebutuhan hidup layak pekerja. Pemerintah menetapkan UMP yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan digunakan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, fakta di lapangan menyebutkan secara rata-rata Upah Minimum Propinsi baru memenuhi sekitar 90% dari Kebutuhan Hidup Layak. Komponen KHL yang ditetapkan pemerintah belum dapat

mewakili kebutuhan para pekerja. Pemerintah menetapkan KHL dengan 60 komponen, tetapi para pekerja menuntut KHL dengan 84 komponen. Dalam prakteknya, KHL ini masih banyak terjadi ketidakadilan bagi pekerja. Oleh sebab itu, KHL dirasa kurang apabila digunakan sebagai dasar penetapan nilai UMP, sehingga perlu menggunakan faktor lain yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK adalah indeks perubahan biaya hidup. Dengan menggunakan IHK, maka pemerintah dapat mengetahui harga-harga saat ini, sehingga tingkat upah dapat disesuaikan dengan harga yang sedang terjadi.

Upah pekerja dalam jangka panjang akan memiliki kemampuan yang semakin sedikit dalam membeli barang, dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini terjadi akibat naiknya harga-harga barang, dan jasa tersebut. Kenaikan tersebut akan menurunkan daya beli dari upah. Pada hakekatnya, harga barang dan upah akan selalu naik, dan yang menjadi masalah adalah naiknya tidak serentak dan juga besarnya tidak sama besar. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana upah akan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga dalam hal ini tingkat upah perlu disesuaikan dengan kenaikan harga barang agar daya beli upah pekerja akan meningkat.

Selain menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan dalam penetapan nilai UMP. TPAK ini dapat digunakan untuk mengetahui penawaran tenaga kerja, sehingga dengan mengetahui tingkat penawaran tenaga kerja

tersebut, maka dapat disesuaikan upah yang layak bagi pekerja karena biasanya upah dihitung berdasarkan penawaran tenaga kerja. Jumlah angkatan kerja di Pulau Jawa sendiri selama periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan dari 67.741.578 pada tahun 2010 menjadi 71.128.148 pada tahun 2014. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini disebabkan oleh peningkatan penduduk berumur 15 tahun ke atas pada periode yang sama, sedangkan untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari tahun ke tahun tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013, dan 2014. Hal ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa

PROINSI	TAHUN				
	2010	2011	2012	2013	2014
DKI Jakarta	67,83	69,36	71,47	67,79	66,61
Banten	65,34	67,79	65,17	63,55	63,84
Jawa Barat	62,38	62,27	63,64	62,82	62,77
Jawa Tengah	70,60	70,77	71,26	70,43	69,68
Jawa Timur	69,08	69,49	69,60	69,78	68,12
DIY	69,76	68,77	71,37	69,29	71,05
Rata-Rata	67,50	68,07	68,75	67,27	67,01

*Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014*

Penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan, sehingga tingkat penawaran tenaga kerja di Pulau Jawa meningkat. Jika penawaran tenaga kerja meningkat, kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka nilai upah akan memburuk.

Penetapan besarnya Upah Minimum Propinsi yang baru, juga mengacu pada nilai tambah yang dihasilkan oleh pekerja. Teori upah efisiensi menyebutkan, dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya, sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk memberi nutrisi yang baik untuk anaknya, sehingga akan memberi dampak yang besar dalam peningkatan produktivitasnya. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh di atas upah keseimbangan, sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat, dan jumlah output yang diproduksi akan meningkat. Jumlah tingkat output yang diproduksi disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB ini penting jika digunakan dalam penetapan nilai upah minimum karena tingkat output yang diproduksi akan berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Jadi jika laba meningkat, maka tingkat upah minimum selayaknya juga meningkat. Perkembangan nilai laju PDRB di Pulau Jawa dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4. PDRB dan UMP di Pulau Jawa

TAHUN		PROPINSI					
		DKI Jakarta	Banten	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DIY
2010	PDRB	1.075.180,48 (6,50%)	271.465,28 (6,11%)	906.685,76 (6,20%)	623.224,62 (5,84%)	990.648,84 (6,68%)	64.678,97 (4,88%)
	UMP	1.118.009 (4,50%)	955.300 (4,11%)	671.500 (6,89%)	660.000 (14,78%)	630.000 (10,52%)	745.695 (6,52%)
2011	PDRB	1.147.558,23 (6,73%)	290.545,84 (6,38%)	965.622,06 (6,51%)	656.268,13 (6,03%)	1.054.401,77 (7,22%)	68.049,87 (5,17%)
	UMP	1.290.000 (15,38%)	1.000.000 (4,67%)	732.000 (9,00%)	675.000 (2,27%)	705.000 (11,90%)	808.000 (8,35%)
2012	PDRB	1.222.527,92 (6,53%)	310.385,59 (6,83%)	1.028.409,74 (6,5%)	691.343,12 (5,34%)	1.124.464,64 (6,64%)	71.702,45 (5,37%)
	UMP	1.529.150 (15,53%)	1.042.000 (4,2%)	780.000 (6,55%)	765.000 (13,33%)	745.000 (5,67%)	892.660 (10,47%)
2013	PDRB	1.297.195,43 (6,11%)	332.517,42 (7,13%)	1.093.585,51 (6,34%)	726.899,71 (5,14%)	1.192.841,86 (6,08%)	75.637,01 (5,49%)
	UMP	2.200.000 (43,87%)	1.170.000 (12,28%)	850.000 (8,97%)	830.000 (8,49%)	866.250 (16,27%)	947.114 (6,10%)
2014	PDRB	1.374.348,61 (5,95%)	350.699,73 (5,47%)	1.148.948,82 (5,06%)	766.271,77 (5,42%)	1.262.700,21 (5,86%)	79.557,25 (5,18%)
	UMP	2.441.301 (10,96%)	1.325.000 (13,24%)	1.000.000 (17,64%)	910.000 (9,63%)	1.000.000 (15,44%)	988.500 (4,36%)

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di setiap Propinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB ini dibarengi dengan peningkatan Upah Minimum Propinsi (UMP), walaupun masih ada laju Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa pada tahun tertentu masih di bawah nilai laju Produk Domestik Regional Bruto.

Perubahan tingkat kemakmuran dari waktu ke waktu dapat pula menjadi faktor yang mempengaruhi nilai Upah Minimum Propinsi. Tingkat kemakmuran suatu daerah tidak hanya dilihat dari besar kecilnya

PDRB karena PDRB tidak bisa menunjukkan berapa jumlah penduduk yang harus dihidupi dari PDRB. PDRB suatu daerah tinggi, namun belum tentu daerah tersebut makmur karena jumlah penduduk di daerah tersebut juga tinggi, sehingga ukuran yang lebih tepat untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama, Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Nilai pendapatan per kapita di Pulau Jawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu 37.022.470,00 pada tahun 2010, dan 44.794.390,00 pada tahun 2014. Pendapatan per kapita ini akan mempengaruhi nilai Upah Minimum Propinsi karena pendapatan per kapita merupakan tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Ketika pendapatan per kapita naik, maka nilai Upah Minimum Propinsi juga meningkat karena masyarakat akan mampu membeli barang dan jasa yang disediakan oleh produsen, sehingga laba para pengusaha akan meningkat, dan pengusaha mampu membayar pekerja dengan upah yang lebih tinggi. Jadi tingkat kemakmuran masyarakat akan berpengaruh terhadap nilai upah minimum.

Rata-rata pendapatan per kapita di Pulau Jawa memiliki nilai di bawah nilai pendapatan per kapita nasional, kecuali DKI Jakarta. Hal ini yang menyebabkan nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa menjadi rendah. Penghitungan upah minimum di suatu Propinsi ditentukan

berdasarkan oleh beberapa faktor. Namun, penelitian ini hanya dibatasi pada faktor Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan per Kapita karena penelitian ini hanya menggunakan faktor makro dengan melihat keadaan ekonomi, dan tenaga kerja di Pulau Jawa.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada yaitu :

1. Nilai upah buruh di Indonesia masih rendah
2. Penetapan besarnya upah antara pengusaha dan pekerja berbeda
3. Upah masih menjadi persoalan utama di berbagai daerah di Indonesia
4. Upah Minimum Propinsi (UMP) di Pulau Jawa di bawah nilai rata-rata UMP nasional
5. Kurang terpenuhinya kebutuhan pekerja dilihat dari perbandingan nilai upah minimum dengan biaya hidup pekerja
6. Terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja di Pulau Jawa, sehingga tingkat Upah Minimum Propinsi cenderung rendah
7. Laju pertumbuhan UMP di Pulau Jawa pada tahun tertentu ada yang masih di bawah nilai laju pertumbuhan PDRB
8. Rata-rata Pendapatan per Kapita di Pulau Jawa memiliki nilai di bawah nilai Pendapatan per Kapita Nasional

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan permasalahan yang diidentifikasi di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penelitian ini akan dibatasi pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Faktor-faktor yang dianalisis meliputi Indeks Harga Konsumen, Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan per Kapita.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa?
2. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau kajian teoritis mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pengupahan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Mahasiswa

- 1) Sebagai wahana latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan.
- 2) Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.

#### b. Bagi Pemerintah

Menjadi masukan dan bahan pembuatan kebijakan dalam perencanaan peningkatan kesejahteraan pekerja.

#### c. Bagi Pekerja

Menjadi sumber informasi bagi pekerja mengenai nilai Upah Minimum Propinsi yang diterimanya dibandingkan dengan nilai Upah Minimum Propinsi daerah lain.

d. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi, dan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya yang relevan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Upah**

###### **a. Pengertian Upah**

Menurut Sadono Sukirno (2002: 353) upah merupakan imbalan jasa yang diterima seseorang di dalam hubungan kerja yang berupa uang atau barang melalui perjanjian kerja, imbalan jasa, dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bagi diri, dan keluarganya. Dalam teori ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh dari berbagai bentuk jasa yang disediakan, dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan

jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi.

- 2) Apabila upah naik (asumsi harga dari barang-barang modal lainnya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lainnya. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin - mesin disebut dengan efek substitusi tenaga kerja (*substitution effect*).

Definisi upah pada UU No 13 tahun 2003 pada pasal 1 ayat 30 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran yang diberikan kepada tenaga kerja buruh atas jasa-jasa fisik maupun mental sebagai imbalan dari para pengusaha dan jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja meliputi masa atau syarat-syarat tertentu yang di dalamnya berupa perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak termasuk tunjangan bagi pekerja, dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

### **b. Teori Upah Efisiensi**

Menurut teori upah efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas ekuilibrium, jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebih. Menurut teori upah efisiensi membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja.

Teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Cafferty (1990) meramalkan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi maka pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang, dan bagi pekerja sendiri dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan

pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan upah yang tinggi maka pekerja pun akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil yang lebih memuaskan sehingga dengan demikian pekerja akan merasa lebih puas dengan hasil pekerjaannya sedangkan bagi perusahaan merasa tidak mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang terampil dan selalu giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya.

Ada beberapa jenis teori upah efisiensi yang dikembangkan oleh Gregory Mankiw (2013: 126) untuk menjelaskan mengapa perusahaan mau membayar upah yang lebih tinggi kepada pekerja, diantaranya :

1) Kesehatan Pekerja.

Teori upah efisiensi yang berkaitan dengan kesehatan pekerja. Para pekerja yang memperoleh upah yang lebih tinggi dapat mengkonsumsi lebih banyak nutrisi, dan dengan demikian akan lebih sehat dan lebih produktif. Sebuah perusahaan mungkin lebih menguntungkan untuk membayar upah tinggi dan memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif, daripada membayar upah yang rendah tetapi

memiliki pekerjaan yang tidak sehat dan kurang produktif. Jenis teori upah efisiensi ini tidak relevan untuk negara maju karena bagi Negara yang sudah maju dan kaya keseimbangan upah sebagian besar di atas tingkat untuk mengkonsumsi nutrisi yang berkecukupan, di sini perusahaan tidak perlu ada kekawatiran jika mereka membayar upah ekuilibrium kesehatan para pekerja mereka akan menurun. Jenis teori upah ini lebih relevan untuk negara berkembang karena sebagian besar pekerja di Negara berkembang kekurangan nutrisi merupakan masalah yang umum, dinegara-negara yang belum maju perusahaan mungkin merasa takut bahwa jika upah dipotong, kesehatan dan produktivitas kerja akan menurun.

## 2) Perputaran Pekerja.

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan hubungan antara upah dengan perputaran kerja. Pekerja berhenti bekerja karena beberapa alasan pindah ketempat pekerjaan lain, pindah ke kota lain, meninggalkan angkatan kerja dal lain-lain. Frekuensi perputaran ini tergantung pada insentif-insentif yang mereka hadapi yaitu manfaat terus bekerja *versus* manfaat berhenti kerja. Semakin tinggi upah yang dibayar kepada tenaga kerja semakin rendah kemungkinan pekerja akan berhenti dari pekerjaannya, jadi sebuah perusahaan dapat mengurangi perputaran pekerja dengan membayar upah yang lebih tinggi.

Alasannya kekhawatiran perputran pekerja tersebut adalah akan lebih mahal bagi perusahaan untuk merekrut dan melatih pekerja-pekerja baru. Selain itu mereka telah dilatih para pekerja baru tidak seproduktif pekerja yang berpengalaman, perusahaan memiliki perputaran pekerjaan yang tinggi dengan demikian akan memiliki biaya produksi yang tinggi pula. Bagi perusahaan mungkin akan lebih menguntungkan apabila membayar upah pekerja di atas tingkat ekuilibrium dalam rangka mengurangi perputaran pekerja.

### 3) Kerja Keras Pekerja.

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana keterkaitan antara upah dengan kerja keras pekerja. Dalam banyak pekerjaan, pekerja bekerja secara bebas, akibatnya perusahaan harus memantau kinerja pekerja tersebut, dan bagi para pekerja yang terbukti melalaikan tanggung jawab mereka akan dipecat. Tetapi tidak semua yang lalai bisa tertangkap secara langsung karena pemantauan pekerja mahal dan tidak efisien. Sebuah perusahaan dapat menanggulangi masalah ini dengan membayar upah di atas tingkat ekuilibrium. Upah yang lebih tinggi akan membuat pekerja lebih setia, dan dengan demikian memberikan insentif kepada pekerja untuk mencurahkan upaya dan pikiran mereka semaksimal mungkin.

#### 4) Kualitas Pekerja.

Jenis teori upah efisiensi ini menjelaskan bagaimana hubungan antara upah dengan kualitas pekerja. Saat merekrut tenaga kerja baru, sebuah perusahaan tidak bisa secara tepat mengukur kualitas dari para pekerja. Dengan membayar upah yang tinggi, perusahaan dapat menarik kelompok pelamar yang lebih berkualitas. Dalam teori upah efisiensi ini ketika sebuah perusahaan menghadapi *supply* pekerja yang berlebihan, mungkin tampak masuk akal dan menguntungkan untuk menurunkan upah yang ditawarkan. Tetapi dengan menurunkan upah, perusahaan beresiko kehilangan pekerja yang berkualitas.

## 2. Upah Minimum

### a. Pengertian Upah Minimum

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu

persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa upah minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun. Definisi tersebut terdapat dua unsur penting dari upah minimum yaitu:

- 1) Upah permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu pertama kali dia diterima bekerja.
- 2) Jumlah upah minimum haruslah dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga.

Upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksplorasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas

tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.

### **b. Serikat Pekerja, dan Tawar Menawar Kolektif**

Menurut Gregory Mankiw (2013: 123), serikat pekerja (*union*) adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar menawar dengan pemberi kerja mengenai upah, dan kondisi kerja. Serikat pekerja merupakan sejenis kartel, yaitu sekelompok penjual yang bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka. Banyak pekerja dalam perekonomian membahas upah, tunjangan, dan kondisi kerja mereka dengan perusahaan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Proses disepakatinya syarat-syarat kerja antara serikat pekerja, dan perusahaan disebut dengan tawar-menawar kolektif(*collective bargaining*).

Ketika berunding dengan perusahaan. Serikat pekerja meminta upah lebih tinggi, tunjangan lebih besar, dan kondisi kerja yang lebih baik daripada ditawarkan oleh perusahaan tanpa adanya serikat pekerja. Jika serikat pekerja, dan perusahaan tidak mencapai kesepakatan, serikat pekerja dapat melakukan penarikan pekerja dari perusahaan, yang disebut dengan pemogokan (*strike*). Pekerja yang mengalami pemogokan tersebut akan mengurangi produksi, penjualan, dan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang menghadapi ancaman pemogokan, besar kemungkinan menyetujui untuk membayar upah yang lebih tinggi.

Apabila serikat pekerja meningkatkan upah di atas titik keseimbangan, serikat pekerja akan meningkatkan jumlah penawaran tenaga kerja, dan mengurangi jumlah permintaan tenaga kerja, sehingga akan menimbulkan pengangguran. Para pekerja yang tetap bekerja menerima keuntungan, namun mereka yang sebelumnya bekerja, dan menganggur, ketika upah meningkat justru akan dirugikan.

Para pendukung serikat pekerja berpendapat bahwa serikat pekerja diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan perusahaan-perusahaan di pasar tenaga kerja. Contoh kasus ekstrim dari kekuasaan pasar tenaga kerja adalah “*company town*” yaitu satu perusahaan mempekerjakan hampir seluruh angkatan kerja yang ada di satu wilayah geografis. Tanpa adanya serikat pekerja, perusahaan dapat menggunakan kekuatan pasarnya untuk membayar upah lebih rendah, dan menawarkan kondisi kerja lebih buruk. Dalam kasus ini, serikat pekerja dapat menyeimbangkan keseimbangan pasar perusahaan, dan melindungi para pekerja dari kesewenangan pemilik perusahaan.

Para pendukung serikat pekerja juga menyatakan bahwa serikat pekerja penting untuk membantu perusahaan merespon kepentingan pekerja secara efisien. Kapan pun seorang pekerja menerima pekerjaan, pekerja tersebut, dan perusahaan harus sepakat dengan berbagai atribut pekerjaan tersebut selain upah

meliputi jam kerja, lembur, cuti tahunan, cuti sakit, tunjangan kesehatan, jadwal promosi, jaminan kerja, dan sebagainya. Dengan mewakili pandangan pekerja terhadap isu-isu ini, harus ada kebijakan untuk menyeimbangkan perbedaan pandangan antara pekerja dengan para pengusaha, sehingga perlu adanya penentuan upah yang sesuai, dan tidak memberatkan pengusaha maupun pekerja. Dalam hal ini, dibuat peraturan tentang upah minimum bagi pekerja. Dengan adanya upah minimum, maka kesejahteraan para pekerja dapat terjamin.

### c. Kebutuhan Hidup Layak

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak disebutkan bahwa Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. KHL sebagai dasar dalam penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Nilai KHL diperoleh melalui survei harga.

Penetapan upah minimum Propinsi didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten/Kota terendah di Propinsi yang bersangkutan dengan menggunakan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu

(marginal). Dalam menetapkan tahapan pencapaian KHL, Gubernur memperhatikan kondisi pasar kerja, usaha yang paling tidak mampu (marginal) di Propinsi/Kabupaten/Kota. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 13 tahun 2012, standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu makanan & minuman (11 items), sandang (13 items), perumahan (26 items), pendidikan (2 items), kesehatan (5 items), transportasi (1 items), dan rekreasi dan tabungan (2 item).

Tabel 5. Komponen-Komponen Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012

No	Komponen	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
<b>I</b>	<b>MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
1	Beras Sedang	Sedang	10 kg
2	Sumber Protein :		
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
3	Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.5 kg
4	Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
5	Gula pasir	Sedang	3 kg
6	Minyak goreng	Curah	2 kg
7	Sayuran	Baik	7.2 kg
8	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
9	Karbohidrat lain (setara tepung)	Sedang	3 kg

	terigu)		
10	Teh atau Kopi	Celup/Sachet	2 Dus isi 25 = 75 gr
11	Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/d 10	15%
	JUMLAH		
<b>II</b>	<b>SANDANG</b>		
12	Celana panjang/ Rok/Pakaian muslim	Katun/sedang	6/12 potong
13	Celana pendek	Katun/sedang	2/12 potong
14	Ikat Pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak branded	1/12 buah
15	Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
16	Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
17	Celana dalam	Sedang	6/12 potong
18	Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai
19	Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
20	Kaos Kaki	Katun, Polyester, Polos, Sedang	4/12 pasang
21	Perlengkapan pembersih sepatu		
	a. Semir sepatu	Sedang	6/12 buah
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12 buah
22	Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
23	Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
24	Perlengkapan ibadah		
	a. Sajadah	Sedang	1/12 potong
	b. Mukena	Sedang	1/12 potong
	c. Peci,dll	Sedang	1/12 potong
	JUMLAH		
<b>III</b>	<b>PERUMAHAN</b>		

25	Sewa kamar	dapat menampung jenis KHL lainnya	1 bulan
26	Dipan/ tempat tidur	No.3, polos	1/48 buah
27	Perlengkapan tidur		
	a. Kasur busa	Busa	1/48 buah
	b. Bantal busa	Busa	2/36 buah
28	Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
29	Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
30	Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
31	Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
32	Perlengkapan makan		
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang
33	Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
34	Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
35	Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
36	Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
37	Rice Cooker ukuran 1/2 liter	350 watt	1/48 buah
38	Kompor dan perlengkapannya		
	a. Kompor 1 tungku	SNI	1/24 buah
	b. Selang dan regulator	SNI	10 liter
	c. Tabung Gas 3 kg	Pertamina	1/60 buah
39	Gas Elpiji	masing-masing 3 kg	2 tabung
40	Ember plastic	Isi 20 liter	2/12 buah
41	Gayung plastic	Sedang	1/12 buah
42	Listrik	900 watt	1 bulan
43	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12 buah
44	Air Bersih	Standar PAM	2 meter

			kubik
45	Sabun cuci pakaian	Cream/deterjen	1.5 kg
46	Sabun cuci piring (colek)	500 gr	1 buah
47	Setrika	250 watt	1/48 buah
48	Rak portable plastic	Sedang	1/24 buah
49	Pisau dapur	Sedang	1/36 buah
50	Cermin	30 x 50 cm	1/36 buah
	JUMLAH		
<b>IV</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
51	Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
52	Ballpoint/pensil	Sedang	6/12 buah
	JUMLAH		
<b>V</b>	<b>KESEHATAN</b>		
53	Sarana Kesehatan		
	a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk local	3/12 buah
	d. Shampo	Produk local	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
54	Deodorant	100ml/g	6/12 botol
55	Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
56	Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12 kali
57	Sisir	Biasa	2/12 buah
	JUMLAH		
<b>VI</b>	<b>TRANSPORTASI</b>		
58	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
	JUMLAH		

<b>VII</b>	<b>REKREASI DAN TABUNGAN</b>		
59	Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
60	Tabungan	(2% dari nilai 1 s/d 59)	2%
	<b>JUMLAH</b>		
	<b>JUMLAH (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>		

*Sumber : Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012*

#### **d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum**

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2013, faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum diarahkan pada pencapaian KHL yaitu dengan membandingkan besarnya upah minimum disesuaikan dengan nilai KHL pada periode yang sama. Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Awalnya penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuaiinya lagi

penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Namun, penetapan upah minumum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Melalui beberapa pendekatan dan penjelasan langsung terhadap pekerja, penetapan upah minimum berdasarkan KHM dapat berjalan dan diterima pihak pekerja dan pengusaha.

Perkembangan teknologi dan sosial ekonomi yang cukup pesat menimbulkan pemikiran, kebutuhan hidup pekerja bedasarkan kondisi "minimum" perlu diubah menjadi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak dapat meningkatkan produktivitas kerja, dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dari gambaran itu, timbul permasalahan, sampai saat ini belum ada kriteria atau parameter yang digunakan sebagai penetapan kebutuhan hidup layak itu. Sumber data yang diperoleh dari responden di lapangan menunjukkan, dari komponen dan jenis kebutuhan hidup minimum yang diajukan kepada responden terdapat lima jenis komponen, yaitu makanan dan minuman, perumahan dan fasilitas, sandang, kesehatan, estetika, dan aneka kebutuhan. Komponen KHM sebagai awal tujuan kebutuhan hidup layak, ternyata sebagian besar responden menyetujui jenis dan

komponen yang terdapat dalam KHM. Hanya saja, perlu mendapat perubahan meliputi kualitas dari barang yang diajukan, dan kuantitas jumlah barang yang dibutuhkan perlu ditambah. Begitu juga pekerja, harus dapat menyisihkan hasil yang diterima paling tidak sebesar 20 persen sebagai tabungan. Menurut Bersales(2014) Penetapan upah minimum juga menggunakan faktor-faktor lain diantaranya:

1) Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) menurut Gregory Mankiw (2013: 26) adalah ukuran biaya keseluruhan barang, dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ahli statistik pemerintah secara rutin menghitung, dan melaporkan IHK. Ketika menghitung IHK, Departemen Statistik menggunakan data tentang harga-harga barang, dan jasa. Langkah-langkah perhitungan IHK yaitu sebagai berikut :

a) Tentukan isi keranjangnya

Menentukan harga-harga yang paling penting bagi konsumen dengan pemberian bobot tertentu.

b) Temukan harga-harganya

Menemukan harga setiap barang, dan jasa dalam keranjang untuk setiap masa waktu.

c) Menghitung harga seluruh isi keranjang

Menggunakan data harga-harga untuk menghitung jumlah harga keseluruhan isi keranjang barang, dan jasa dari waktu ke waktu.

d) Memilih tahun basis, dan menghitung indeksnya

Memilih satu tahun dari tahun basis yang merupakan tolak ukur yang menjadi bandingan tahun-tahun yang lainnya. Untuk menghitung indeksnya, harga barang, dan jasa untuk setiap tahun dibagi dengan harga keranjang pada tahun basis. Perbandingan ini kemudian dikalikan dengan 100. Angka hasilnya adalah indeks harga konsumen.

Target Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah mengukur perubahan-perubahan pada biaya hidup. Dengan kata lain, IHK mencoba untuk mengukur berapa banyak penghasilan yang harus dinaikkan guna memelihara standar hidup yang konstan.

Menurut Bersales (2014) Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan komponen penting dalam menggunakan penetapan nilai upah minimum. Ketika biaya hidup masyarakat tinggi, maka tingkat upah selayaknya ditingkatkan.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Gregory Mankiw (2013: 111) Angkatan kerja (*labor force*) didefinisikan sebagai jumlah orang yang bekerja dan orang yang menganggur, sedangkan tingkat pengangguran (*unemployment rate*) didefinisikan sebagai

persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor-force participation rate*) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2014) Rumus Perhitungan:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Dalam pandangan klasik upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk pasar tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin

dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, penawaran tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas penawaran tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas penawaran tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik. Penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Seperti halnya penawaran, *demand* atau permintaan tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Motif perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumennya. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi perusahaan itu. Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenagakerja (*L*) dan modal (*K*), sebagai berikut:

$$TP = f(L, K)$$

dimana:

TP = Produksi total (output)

L = Tenaga kerja

K = Modal

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika upah diserahkan pada mekanisme pasar yaitu dilihat dari permintaan dan penawaran tenaga kerja, maka pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh di atas permintaannya, hal ini mengakibatkan tingkat upah menjadi lebih rendah. Dimana tingkat upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Untuk melindungi hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upah minimum, agar upah yang diterima minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kondisi demikian banyak terjadi pada pasar tenaga kerja yang *unskill labour*, misal Indonesia. Sehingga untuk melindungi para pekerja tersebut maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerapkan upah minimum guna melindungi para pekerja (buruh).

### 3) Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Gregory Mankiw (2013: 6) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu daerah pada

periode tertentu. Sisi produksi ekonomi merubah input seperti tenaga kerja, dan modal menjadi output. Input semacam buruh, dan modal disebut faktor produksi, sedangkan pembayaran terhadap faktor tersebut seperti upah dan bunga disebut pembayaran faktor (*factor of payment*). Data PDRB dalam prakteknya digunakan tidak hanya untuk mengukur seberapa banyak output yang diproduksi, tetapi juga sebagai pengukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak, dan restribusi meningkat. Hal ini akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut.

Dalam penetapan upah minimum, pihak pemerintah, dan Dewan Pengupah akan tetap menggunakan faktor lain yaitu laju PDRB (Bersales, 2014). Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan output PDRB, maka upah minimum selayaknya ditingkatkan. Peningkatan output PDRB merupakan sebuah pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah. PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk mengukur kinerja keseluruhan. Jumlahnya akan sama dengan jumlah dari nilai nominal konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang

dan jasa serta ekspor netto. Tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB adalah:

a) Pendekatan produksi

Melalui pendekatan produksi, produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan berbagai sector perekonomian. Persamaan fungsi produksi pada pendekatan produksi adalah sebagai berikut:

Di mana:

Y = Produksi

K = modal

L = tenaga kerja

t = teknologi

Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 sektor yaitu:

- (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan,
  - (2) pertambangan dan penggalian,
  - (3) industri penggalian,
  - (4) listrik, gas dan air bersih,
  - (5) bangunan,
  - (6) pedagangan, hotel dan restoran,
  - (7) pengangkutan dan komunikasi,
  - (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,

(9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.

b) Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan merupakan suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh melalui penjumlahan pendapatan dari berbagai faktor produksi terhadap proses produksi. Pendapatan nasional yang dimaksud di sini diperoleh melalui penjumlahan dari berbagai unsur dan jenis pendapatan.

(1) Kompensasi untuk pekerja yang terdiri dari upah (*wages*) dan gaji (*salaries*) ditambah faktor lain (pensiun dan dana jaminan sosial).

(2) Keuntungan perusahaan atau *corporate profit* merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan, yang dibagikan kepada para pemilik saham (*stockholders*) sebagai deviden dan ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.

(3) Pendapatan usaha perorangan merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari *self employed person, self employed professional*, dan lain-lain.

(4) Pendapatan sewa merupakan kompensasi yang untuk pemilik tanah, *rental business*, dan *residential properties*.

(5) Bunga netto atau *net interest* terdiri dari bunga yang dibayarkan perusahaan dikurangi bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar pemerintah, dan konsumen tidak termasuk didalamnya.

Pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Di mana:

NI = Pendapatan nasional

$Y_w$  = Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak.

$y_j$  = Pendapatan dari bunga.

**Ynr** = Pendapatan dari keuntungan perusahaan Y

Ynd = pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

c) Pendekatan pengeluaran

Pendekatan pengeluaran merupakan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan perekonomian dan diukur pada harga pasar yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa produk nasional atau Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan di sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa-jasa (C), permintaan di sektor bisnis seperti barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar negeri untuk kegiatan sektor ekspor dan impor (X-M).

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dapat dijelaskan dalam persamaan berikut:

Di mana:

$Y$  atau PDRB = Produk Domestik Regional Bruto  
 $C$  = konsumsi  
 $I$  = investasi  
 $G$  = pengeluaran pemerintah  
 $NX$  = ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

PDRB adalah semua komponen dari permintaan akhir, yang terdiri dari:

- (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba
  - (2) konsumsi pemerintah,
  - (3) pembentukan modal tetap domestik bruto,
  - (4) perubahan stok
  - (5) ekspor netto.

#### 4) Pendapatan per kapita

Menurut Sadono Sukirno (2013: 424) pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu Negara pada periode tertentu. Nilai pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Masyarakat dipandang mengalami peningkatan kemakmuran apabila pendapatan per kapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil menerus bertambah. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai pendapatan per kapita. Kenaikan pendapatan per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010 yaitu pendapatan per kapita hasil bagi dari PDRB yang dihitung dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu sebagai dasar/referensi terhadap jumlah penduduk.

Rumus Perhitungan :

$$IPCn = \frac{PDB}{Pn}$$

Dimana :

- IPCn = Income Per Capita (Pendapatan Per kapita) tahun n
- GNPn = Gross National Product (Produk Nasional Bruto) tahun n
- Pn = Population (Jumlah Penduduk) tahun n

Pendapatan per Kapita memiliki efek positif terhadap upah minimum. Jika Pendapatan per Kapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum mengacu pada tingkat kemakmuran suatu Negara yang dicerminkan oleh Pendapatan per Kapita.

## B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang Dilakukan oleh Ilham Kristanto (2011) dalam skripsi yaitu menganalisis faktor yang mempengaruhi UMK di Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terbentuk dalam runtun waktu (*time series*). Data yang digunakan meliputi Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat inflasi dari tahun 1990-2011 di Jember, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disnakertrans). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upah minimum. Namun jika secara parsial, variabel yang berpengaruh secara signifikan, dan positif hanya variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penetapan nilai upah minimum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan PDRB sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian Ilham Kristanto menggunakan KHL, dan inflasi sebagai variabel independen. Sementara penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB, dan Pendapatan per kapita sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, dan analisis data yang digunakan. Penelitian Ilham Kristanto menggunakan analisis regresi linier berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

2. Penelitian yang Dilakukan Ninda Noviani Charysa (2013) dalam jurnal dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan inflasi terhadap upah minimum regional. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel *model random effect* (REM) dengan metode *Generalized Least Square* (GLS). Jenis data yang digunakan berupa gabungan dari data *time series* periode 2008-2011, dan *cross section* 35 kabupaten/kota yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian ini adalah koefisien positif dari pertumbuhan ekonomi adalah 20,561 yang berarti jika pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka UMR akan meningkat

Rp20.561,00. Koefisien positif dari inflasi sebesar 13,564 yang berarti jika inflasi naik 1%, maka UMR juga naik sebesar Rp13.564,00. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dan inflasi secara parsial berpengaruh terhadap upah minimum regional.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data panel. Perbedaannya dengan Ninda Noviani Charysa adalah penelitian menggunakan pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sebagai variabel independen. Sementara penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), PDRB, dan Pendapatan per kapita sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian Ninda Noviani Charysa berada di Jawa Tengah, sedangkan penelitian ini menggunakan cakupan penelitian seluruh Propinsi di Pulau Jawa.

3. Penelitian yang Dilakukan oleh Bersales (2014) dalam jurnal dengan judul "*Determinant of Regional Minimum Wage in the Philippines*". Di Filipina, Upah Nasional dan Komisi Produktivitas (NWPC) merumuskan kebijakan dan pedoman tentang Upah Tripartit, dan Dewan Produktivitas dalam menentukan upah minimum pada masing-masing daerah di Filipina. Menurut Bersales (2014), NWPC bertugas menentukan faktor yang akan dipertimbangkan oleh Dewan Pengupahan untuk menentukan upah minimum. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data Indeks Harga Konsumen (IHK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Filipina periode tahun 1990-2012. Analisis data yang digunakan adalah data panel menggunakan model *Fixed Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu upah minimum regional secara signifikan adalah IHK, PDRB, dan TPAK. Persamaan estimasi *Fixed Effect* pada data panel dapat digunakan untuk mengukur faktor penentu upah yang digunakan dalam membuat penentuan upah minimum secara final.

Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan IHK, TPAK, dan PDRB sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Bersales terletak pada desain penelitian. Penelitian Bersales menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif oleh Bersales menggunakan data krisis keuangan Asia, Efek dari teknologi *Bubble Burst*, dan efek dari krisis ekonomi global. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian Bersales berada di Filipina, sedangkan penelitian ini menggunakan cakupan semua propinsi di Pulau Jawa.

4. Penelitian yang Dilakukan oleh Tamada (2009) dalam jurnal yaitu dengan judul “*Analysis of Determinant of Minimum Wage in Japan*”. Data yang digunakan adalah data tingkat kenaikan rata-rata biaya hidup, rasio pertumbuhan upah, pendapatan bruto produsen, dampak yang ditimbulkan dari pemberian upah, defisit keuangan, serikat

pekerja, dan rasio pekerja pada periode tahun 2001-2010. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode OLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum hanya rasio pertumbuhan upah. Untuk variabel yang lain seperti data tingkat kenaikan rata-rata biaya hidup, pendapatan bruto produsen, dampak yang ditimbulkan dari pemberian upah, defisit keuangan, serikat pekerja, dan rasio pekerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan upah minimum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan tingkat kenaikan rata-rata biaya hidup sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah penelitian Tamada menggunakan rasio pertumbuhan upah, pendapatan bruto produsen, dampak yang ditimbulkan dari pemberian upah, defisit keuangan, serikat pekerja, dan rasio pekerja sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, dan analisis data yang digunakan. Cakupan penelitian yang dilakukan Tamada adalah kawasan Jepang, sedangkan cakupan dalam penelitian ini menggunakan lingkup semua propinsi di Pulau Jawa. Penelitian Tamada menggunakan metode OLS, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode regresi data panel.

5. Penelitian yang Dilakukan oleh Arnaud (2005) dalam jurnal dengan judul "*The Rise and Fall of Provincial Minimum Wage : Labor Movement, Business Interest, and Partisan Theory*". Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data serikat pekerja, besar

kecilnya usaha, kebijakan pemerintah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pengangguran, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada periode tahun 1976-2003. Analisis data yang digunakan dengan metode data panel yaitu penggabungan antara *cross sectional*, dan *time series*. Penelitian ini saya menganalisis bagaimana politik akan mempengaruhi kebijakan penentuan tingkat upah minimum. Dalam penelitiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan upah minimum adalah serikat pekerja, besar kecilnya usaha, kebijakan pemerintah, TPAK, pengangguran, dan PDRB perkapita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa serikat pekerja, besar kecilnya usaha, kebijakan pemerintah, TPAK, pengangguran, dan PDRB perkapita berpengaruh terhadap kenaikan upah minimum.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan TPAK, dan PDRB per kapita sebagai variabel independen. Persamaan lainnya yaitu menggunakan analisis data menggunakan data panel. Perbedaannya adalah penelitian Arnaud menggunakan data serikat pekerja, besar kecilnya usaha, kebijakan pemerintah, dan pengangguran sebagai variabel independen. Perbedaan lainnya yaitu lokasi penelitian, Cakupan penelitian yang dilakukan Arnaud adalah kawasan semua propinsi di Kanada, sedangkan cakupan dalam penelitian ini menggunakan lingkup Pulau Jawa.

Penelitian tentang analisis faktor-faktor Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa ini lebih mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bersales

(2014) yaitu menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, pada penelitian ini variabel independen ditambah dengan Pendapatan per kapita karena Pendapatan per kapita ini digunakan sebagai ukuran kesejahteraan penduduk. Jadi, Pendapatan per kapita ini penting jika digunakan dalam perhitungan nilai Upah Minimum Propinsi.

### C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diketahui bahwa nilai upah minimum Propinsi (UMP) di Pulau Jawa masih di bawah nilai rata-rata upah minimum nasional. Penentu kebijakan upah minimum adalah Pemerintah Daerah Propinsi dengan menerima usulan dari Dewan Pengupahan yang bersifat independen yang terdiri dari tripartite yaitu pakar praktisi, wakil serikat buruh, dan Wakil Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Dalam penentuan kebijakan ini, ada beberapa komponen yang dipertimbangkan diantaranya Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Laju Produk Domestik Bruto (PDRB).

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan faktor penting dalam penetapan nilai upah minimum karena IHK adalah ukuran perubahan-perubahan pada biaya hidup. Jika biaya hidup pekerja dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja tersebut akan tercapai. Kebijakan penentuan upah minimum Propinsi perlu menggunakan faktor biaya hidup pekerja

dalam hal ini Indeks Harga Konsumen untuk mensejahterakan kaum buruh/pekerja.

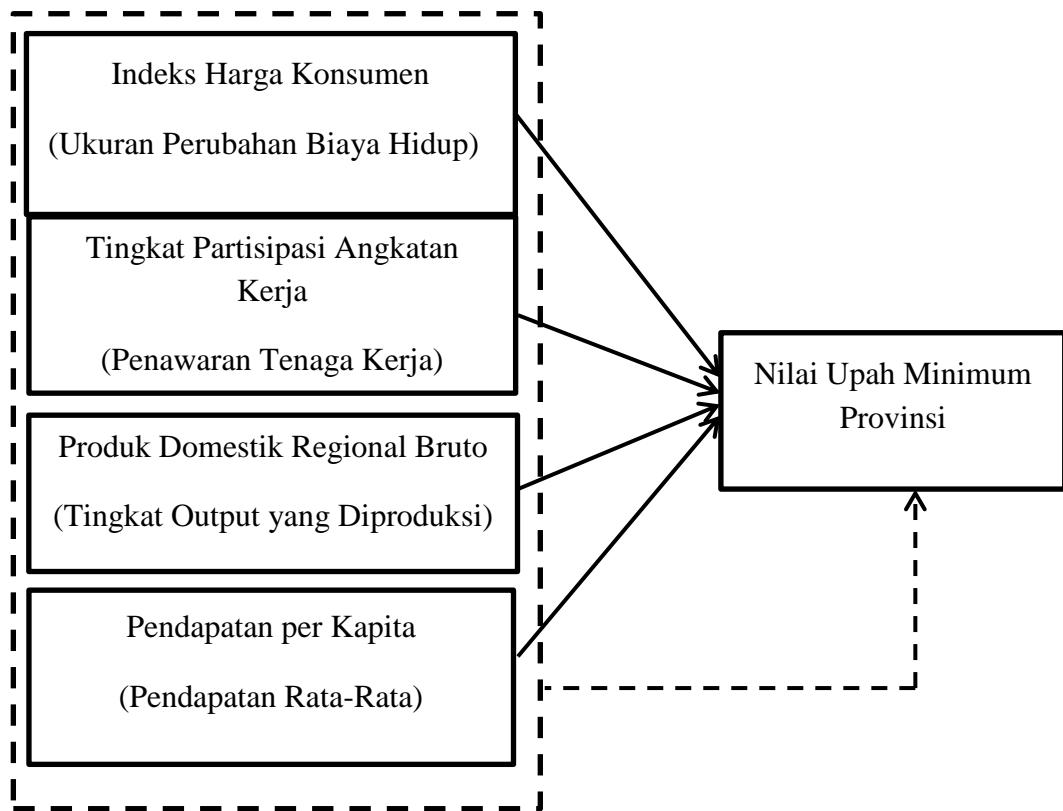
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Untuk mengetahui banyaknya angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja, maka dipakai suatu ukuran yang dinamakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. TPAK dihitung berdasarkan jumlah angkatan kerja yang bekerja pada periode tertentu. TPAK akan mempengaruhi nilai upah minimum karena jika tingkat penawaran tenaga kerja tinggi, maka nilai upah akan cenderung menurun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi (UMP). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu di wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tetapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Apabila terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja yang diukur dari output PDRB, maka upah minimum akan meningkat.

Pendapatan per Kapita juga merupakan faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi (UMP). Pendapatan per Kapita menunjukkan

tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Nilai Pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai pendapatan per kapita. Pendapatan per Kapita memiliki efek positif terhadap upah minimum. Apabila rasio Pendapatan per Kapita tinggi, maka akan terjadi kenaikan upah minimum.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan maka dapat digambarkan bagan paradigma dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan :

----- ➤ : hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan

————→ : hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian sebelumnya, dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Indeks Harga Konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014

H2 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014

H3 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014

H4 : Pendapatan per Kapita berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014

H5 : IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan per Kapita secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum Propinsi di Pulau Jawa tahun 2010-2014

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2011: 8). Data yang digunakan dalam penelitian ini berwujud dalam bentuk angka yang kemudian diolah dengan menggunakan analisis statistik guna menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa.

#### **B. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 38). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu:

##### **1. Variabel Dependen (Y)**

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu upah minimum Propinsi (Y). Upah Minimum Propinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk

tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur. Penelitian ini menggunakan UMP tahun 2010-2014.

2. Variabel Independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam analisis penetapan upah minimum propinsi yaitu:

a. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

$$\text{IHK} = \frac{\text{Harga Sekarang}}{\text{Harga pada Tahun Dasar}} \times 100\%$$

Keterangan :

IHK : Indeks Harga Konsumen

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

### c. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Penghitungan PDRB dalam penelitian ini menggunakan harga konstan.

#### 1) Pendekatan produksi

$$Y = f(K, L, t)$$

Di mana:

$Y$  = Produksi

$K$  = modal

$L$  = tenaga kerja

$t$  = teknologi

#### 2) Pendekatan Pendapatan

$$NI = Y_w + Y_i + Y_{nr} + Y_{nd}$$

Di mana:

$NI$  : Pendapatan nasional.

$Y_w$  : Pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya.

$Y_i$  : Pendapatan dari bunga.

$Y_{nr}$  : Pendapatan dari keuntungan perusahaan  $Y$ .

$Y_{nd}$  : pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

#### 3) Pendekatan Pengeluaran

$$Y \text{ atau } PDRB = C + I + G + NX$$

Di mana:

$Y$  atau  $PDRB$  : Produk Domestik Regional Bruto

$C$  : Konsumsi

$I$  : Investasi

$G$  : Pengeluaran pemerintah

$NX$  : Ekspor neto (Ekspor dikurangi Impor)

#### d. Pendapatan per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan representasi tingkat kemakmuran dan aktivitas perekonomian masyarakat. PDRB per kapita diperoleh dari pembagian antara pendapatan domestik regional bruto pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di wilayah yang bersangkutan. Perhitungan ini menggunakan rumus:

$$IPCn = \frac{GNP}{Pn}$$

Dimana :

IPCn = Income Per Capita (Pendapatan Per kapita) tahun n  
 GNPn = Gross National Product (Produk Nasional Bruto) tahun n  
 Pn = Population (Jumlah Penduduk) tahun n

#### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada baik data internal maupun eksternal organisasi dan data dapat diakses melalui internet, penelusuran dokumen atau publikasi informasi.

Tabel 5. Sumber Data Penelitian

Variabel	Sumber Data
Upah Minimum Propinsi (UMP)	Survei Upah Buruh (SUB) oleh BPS tahun 2010-2014
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Survei Biaya Hidup oleh BPS tahun 2010-2014
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS tahun 2010-2014
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS tahun 2010-2014
Pendapatan Perkapita	Survei Khusus Pendapatan Regional (SKPR) oleh BPS tahun 2010-2014

## D. Tahap-tahap Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data menurut Hasan (2006: 24) meliputi:

1. *Editing Data* (Pemeriksaan Data)

Pada tahap *Editing Data*, dilihat kembali validitas data yang akan diolah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses editing yaitu:

- a. Kelengkapan, dan kesempurnaan data (tidak ada data yang kosong)
- b. Konsistensi Data
- c. Keseragaman satuan perhitungan

2. Analisis data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis *cross section* dan *time series*. Adapun analisis data dilakukan dengan bantuan Program *Eviews 8*.

### a. Analisis Regresi Data Panel

Model penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum ini dikembangkan oleh Arnaud (2005) menggunakan data panel yang ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{LnMWit} = \beta_0 + \beta_1 \text{CPI}_{it} + \beta_2 \text{EMP}_{it} + \ln \beta_3 \text{GRDP}_{it} + \ln \beta_4 \text{IPC}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Ln	: Logaritma natural
MW	: Upah minimum propinsi pada periode t (Rupiah)
$\beta_0$	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	: koefisien regresi
CPI	: IHK pada periode t (Persen)
EMP	: TPAK pada periode t (Persen)
GRDP	: PDRB pada periode t (Rupiah)
IPC	: Pendapatan per kapita periode t (rupiah)
<sub>i</sub>	: <i>cross section</i> (data panel)
<sub>t</sub>	: <i>time series</i>
$\varepsilon$	: <i>error term</i> pada periode t

Dalam regresi data panel terdapat empat model yang dapat digunakan.

Model tersebut antara lain: model *OLS pooled*, *model fixed effects least square dummy variabel* (LSDV), *model fixed effects within-group* dan model *random effect* (Gujarati, 2013: 241). Pemilihan model yang akan dipakai, diseleksi dengan uji spesifikasi model. Terdapat dua uji spesifikasi yaitu efek tetap (*fixed effects*) atau efek random (*random effect*).

### **b. Pemilihan Metode Estimasi Regresi Data Panel**

Pemilihan metode regresi data panel ini dilakukan dengan bantuan Program *Eviews* 8. Metode ini digunakan untuk menentukan metode/pendekatan yang baik dalam mengestimasi regresi data panel terdapat beberapa prosedur yang dapat dilakukan, yaitu:

#### 1) Uji Chow (*Chow Test*)

Menurut Sofyan Yamin (2011: 201) Uji Chow adalah pengujian yang digunakan untuk memilih metode yang sesuai antara *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi F- statistik. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$H_0 = \text{Pooled Least Square (PLS)}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$$

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka ditolak, sehingga model menggunakan *fixed effect*.

#### 2) Uji Haussman (*Haussman Test*)

Menurut Damodar N. Gujarati (2013: 252) Uji Haussman dilakukan untuk menentukan metode yang paling baik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : *Random Effect Model* (REM)

$H_a$  : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka sebaiknya model menggunakan *fixed effect*.

### 3) Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Menurut Damodar N. Gujarati (2013: 253) *Lagrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* (REM) atau *Pooled Least Square* (PLS) metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Uji signifikansi *Random Effect Model* ini dikembangkan oleh Breusch Pagan (BP). Metode Breusch Pagan untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya *random effect* yaitu  $\sigma_u^2$  adalah sama dengan nol. Dengan hipotesis nol tersebut, BP menggunakan sebuah distribusi chi-kuadrat dengan 1 df karena hipotesis yang diuji tunggal yaitu  $\sigma_u^2 = 0$ . Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0$  : *Pooled Least Square* (PLS)

$H_a$  : *Random Effect Model*(REM)

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai statistik chi-square maka  $H_0$  ditolak, yang artinya metode estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect*.

#### a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *Eviews 8*. Agar tercapai suatu estimasi, koefisien regresi diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Ordinal Least Square Estimator*) yang merupakan estimasi linier tak bias BLUE (*Best Linier Unbiased Estimators*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan uji ekonometrika yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

##### 1) Uji Multikolinieritas

Menurut Sofyan Yamin (2011: 115) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika koefisien korelasi memiliki nilai kurang dari 0,8 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

##### 2) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Sofyan Yamin (2011: 93) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji *White*. Jika nilai probabilitas  $\chi^2$  hitung > nilai probabilitas kritis  $\alpha$  (0.05) maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3) Uji Autokorelasi

Menurut Sofyan Yamin (2011: 73) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode-t dengan kesalahan penganggu pada pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan membandingkan nilai Durbin Watson hitung (d) dengan nilai Durbin Watson tabel, yaitu batas atas (du) dan batas bawah (dl).

Tabel 6. Kriteria Pengujian Durbin Watson

<b>Hipotesis Nol</b>	<b>Keputusan</b>	<b>Kriteria</b>
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$dl < d < du$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-du < d < 4dl$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$du < d < 4-du$

Sumber : Damodar Gujarati, Basic Econometrics

#### 4) Uji Normalitas

Menurut Sofyan Yamin (2011: 46) uji normalitas bertujuan apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Pengambilan keputusan dengan Jargue-Bera test atau J-B test yaitu apabila nilai probability > 5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

### b. Uji Statistik

Uji statistik dilakukan dengan bantuan Program *Eviews* 8. Uji statistik ini digunakan untuk mengetahui besarnya masing-masing koefisien dari variabel-variabel bebas baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap variabel terikat yaitu dengan menggunakan uji secara serentak (uji-F), uji parsial (uji-t) dan koefisien determinasi berganda ( $R^2$ ).

#### 1) Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Menurut Doddy Ariefianto (2012: 22) Uji F digunakan untuk menguji secara kolektif pengaruh Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Produk Dometik Regional Bruto (PDRB), dan Pendapatan per Kapita terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP). Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model yang diasumsi layak atau tidak. Layak di sini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas F hitung < tingkat signifikansi 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak.

2) Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa model uji-t ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan:

- (1) Jika probabilitas t hitung <  $\alpha$  (0.05), maka  $H_0$  ditolak
- (2) Jika probabilitas t hitung >  $\alpha$  (0.05), maka  $H_0$  diterima,

Doddy Ariefianto (2012: 20).

3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi atau sumbangannya variabel independen terhadap variabel dependen.

Koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai Adjusted R-Squared atau  $R^2$ . Nilai  $R^2$  selalu terletak antara 0 sampai dengan 1 (Doddy Ariefianto, 2012: 25). Nilai  $R^2$  digunakan untuk menunjukkan besarnya regresi yang mampu menjelaskan variabel terikat.

### 3. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan penjelasan terperinci mengenai hasil data yang telah didapatkan. Interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati

karena kualitas analisis sangat tergantung pada kualitas interpretasi yang dibuat peneliti terhadap data. Interpretasi memiliki dua aspek yaitu:

- a. Untuk keseimbangan penelitian yaitu hasil penelitian dapat dihubungkan dengan penemuan atau penelitian lainnya
- b. Untuk membuat atau menjelaskan suatu konsep

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa dari data Survei Upah Buruh (SUB), Survei Biaya Hidup, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Khusus Pendapatan Regional tahun 2010-2014. Pembahasan akan disajikan melalui analisis deskriptif antara variabel terikat, dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Upah Minimum Propinsi, sedangkan variabel bebas yang dimaksud adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, PDRB, dan Pendapatan per Kapita. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil statistik data dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini setelah dilakukan pengolahan data adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

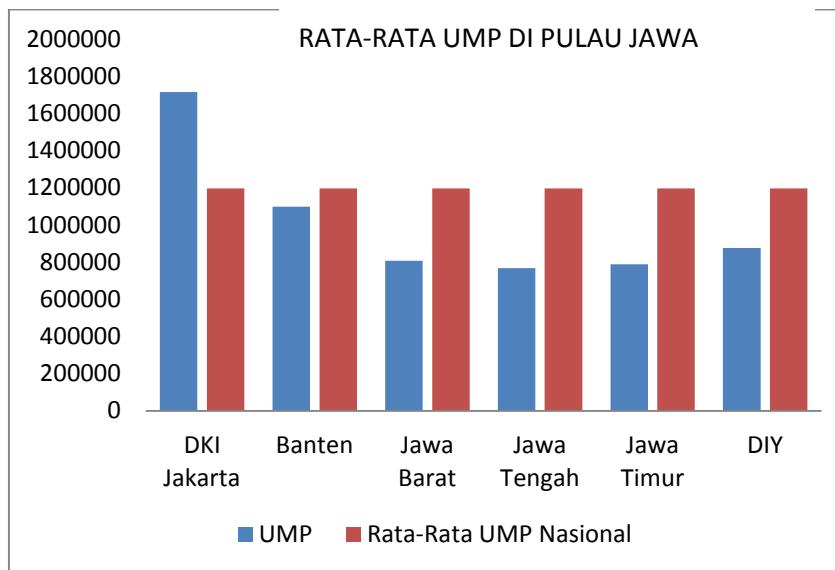
<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Rata-Rata (Mean)</b>	<b>Standar Deviasi</b>
UMP (rupiah/bulan)	30	630000	2441301	1009082.63	415978.20
IHK (persen/bulan)	30	110.04	141.69	124.42	9.43
TPAK (persen/tahun)	30	62.27	71.47	67.72	3.06
PDRB (milyar rupiah/tahun)	30	64678.97	1374348.61	746246.28	448434.37
Pendapatan per Kapita (ribu rupiah/tahun)	30	18652.97	136407.58	40900.43	38129.20336

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 (diolah)

Dari tabel statistik dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Upah Minimum Propinsi

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat besaran nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum dan minimum dari UMP , IHK, PDRB, dan Pendapatan per Kapita. Nilai rata-rata hitung (*mean*) UMP sebesar Rp1.009.082,63, IHK sebesar 124.42, PDRB sebesar Rp448.434,37 milyar, dan Pendapatan per Kapita sebesar Rp40.900.000,43 per tahun. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada gambar 2.

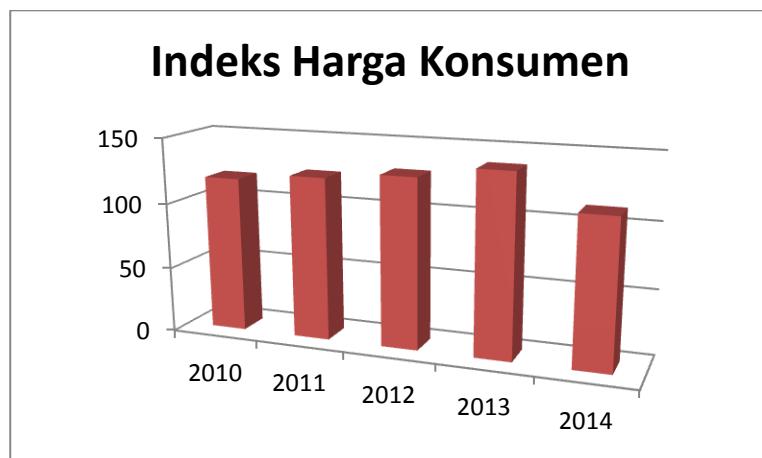


Gambar 2. Nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014

Gambar 2 menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DIY memiliki nilai UMP yang di bawah nilai rata-rata UMP nasional, sedangkan untuk UMP Propinsi DKI Jakarta telah melebihi nilai rata-rata UMP Nasional. Propinsi Banten memiliki nilai UMP tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, sedangkan Propinsi Jawa Tengah memiliki nilai upah minimum paling rendah. Ada pun masing-masing daerah memiliki tingkat nominal upah yang berbeda-beda. Ketentuan nilai UMP antardaerah tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indicator yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pasar kerja, pendapatan per kapita, daya beli, kebutuhan hidup pekerja, dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing.

## 2. Indeks Harga Konsumen

Berikut grafik laju IHK tahun 2010-2014.

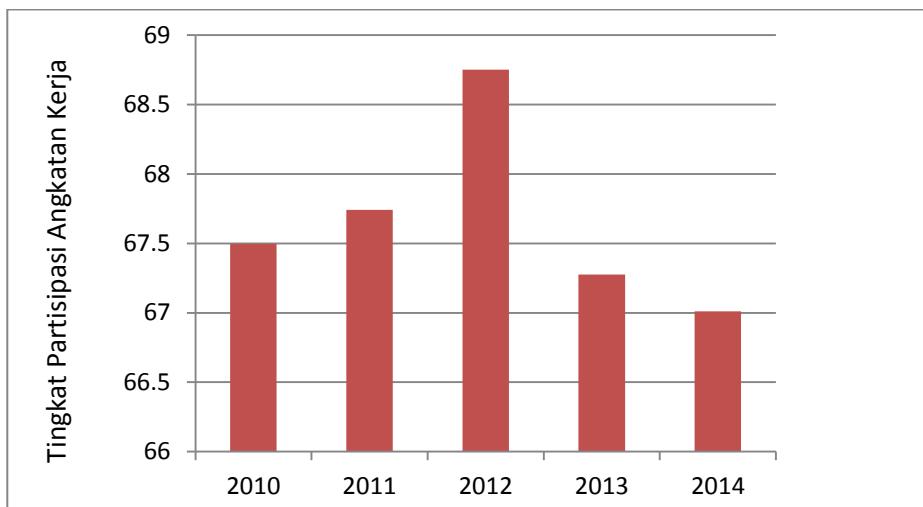


Gambar 3. Nilai IHK Pulau Jawa tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik di atas, Nilai IHK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2014. Penurunan IHK ini mengindikasikan bahwa harga barang dan jasa mengalami penurunan.

## 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa sebesar 67,72%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ini dipengaruhi oleh jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Penurunan TPAK terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Berikut TPAK Pulau Jawa tahun 2010-2014.

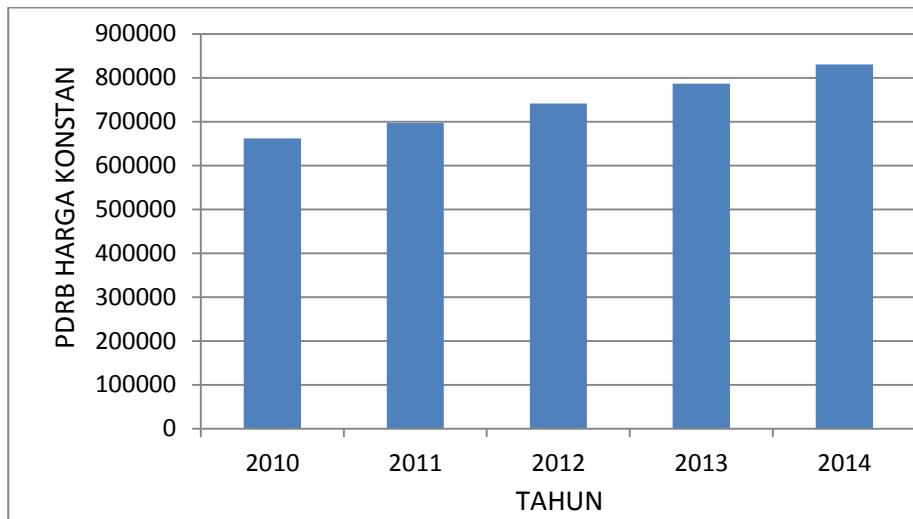


Gambar 4. TPAK di Pulau Jawa

Berdasarkan grafik tersebut, TPAK di Pulau Jawa mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014. Penurunan TPAK ini disebabkan oleh jumlah lapangan pekerjaan di Pulau Jawa ini yang semakin sempit.

#### 4. Produk Regional Domestik Bruto

Produk Regional Domestik Bruto memiliki rata-rata sebesar 74.6246,28 milyar, nilai terendah sebesar 64.678,97 milyar, nilai tertinggi 1.374.348,61 milyar. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dihitung atas dasar harga konstan 2010 terus mengalami kenaikan. Berikut grafik perkembangan nilai PDRB di Pulau Jawa tahun 2010-2014.

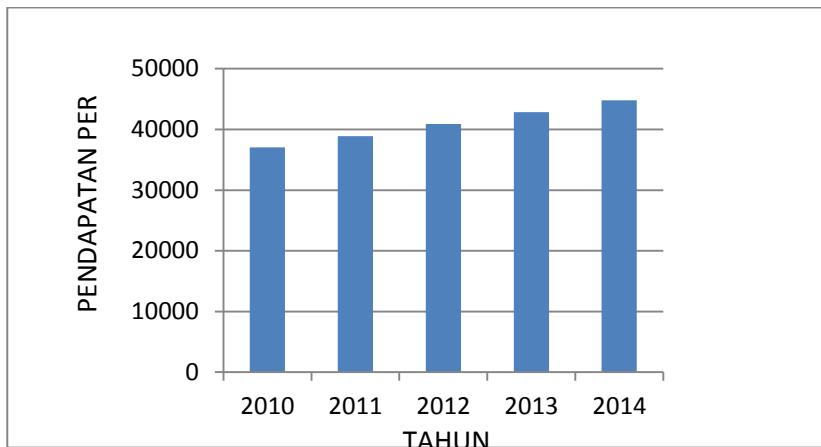


Gambar 5. Perkembangan Nilai PDRB di Pulau Jawa

Dari grafik diatas terlihat bahwa PDRB di Pulau Jawa terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian di Pulau Jawa.

##### 5. Pendapatan per Kapita

Rata-rata Pendapatan per Kapita Propinsi di Pulau Jawa sebesar 40.904.300 per tahun. Perkembangan pendapatan per kapita secara riil atau dihitung atas dasar harga konstan 2010 terus mengalami kenaikan. Berikut grafik perkembangan pendapatan per kapita Pulau Jawa selama periode 2010-2014 :



Gambar 6. Rata-Rata Pendapatan per Kapita di Pulau Jawa

Dari grafik diatas terlihat bahwa Pendapatan per kapita di Pulau Jawa terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kesejahteraan penduduk di Pulau Jawa secara rata-rata dengan asumsi semua penduduk menerima manfaat yang sama dari hasil pertumbuhan. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan pendapatan per kapita akan meningkat apabila peningkatan PDRB lebih besar dari proporsi peningkatan jumlah penduduk.

## B. Analisis Data

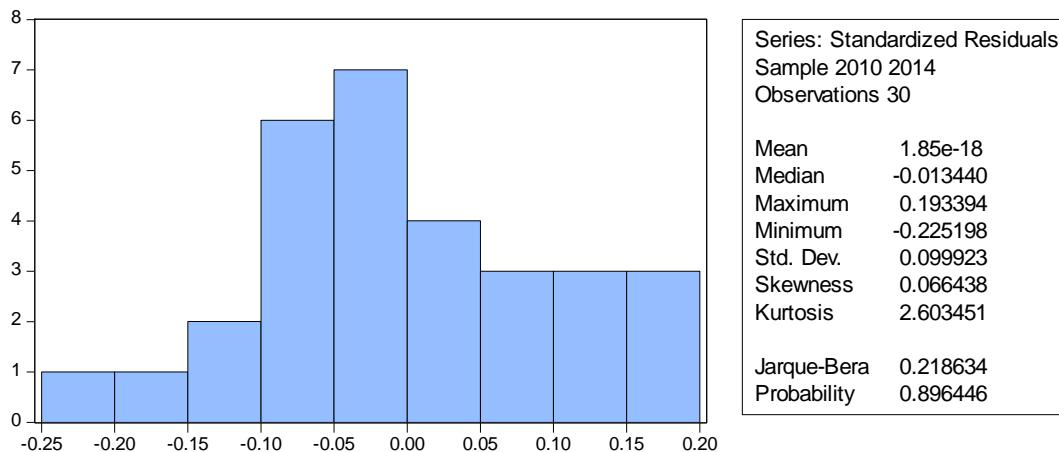
### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jargue-Bera test atau J-B

test yaitu apabila nilai probability  $> 5\%$ , maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

### HASIL UJI NORMALITAS



Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0.896446 menunjukkan bahwa  $prob > 5\%$ . Sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan penganggu pada waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji *Durbin-Watson (DW)*. Kriteria dari uji DW sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Pengujian Durbin Watson

Hipotesis Nol	Keputusan	Kriteria
Ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_l < d < d_u$
Ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4-d_u < d < 4-d_l$
Tidak ada autokorelasi	Jangan tolak	$d_u < d < 4-d_u$

Sumber : Damodar Gujarati, Basic Econometrics

Dari hasil uji *DW* yang telah dilakukan, didapatkan hasil *Durbin-Watson stat* sebesar 1.960 sedangkan  $d_L = 1.143$  dan  $d_u = 1.739$ . Nilai  $d$  hitung lebih besar dari  $d_u$ , dan lebih kecil dari  $4-d_u$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil regresi dari log residu kuadrat terhadap seluruh variabel menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.

#### d. Uji Multikolinearitas

Uji multikolininearitas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas

dari masalah multikolinearitas. Dari hasil uji yang dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas.

## 2. Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel

### a. Uji Chow

Pertama-tama data panel diesmitasi menggunakan efek spesifikasi *fixed*. Uji yang dilakukan yaitu uji Chow. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah sebaiknya model menggunakan *fixed effect* atau *common effect*.

$H_0$ : Common Effect

$H_a$ : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square kurang dari 5%, maka ditolak, sehingga model menggunakan fixed effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi fixed adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.036356	(5,20)	0.0015
Cross-section Chi-square	27.597591	5	0.0000

Sumber :output Eviews 8

Berdasarkan hasil di atas, diketahui probabilitas Chi-square sebesar 0,0000 sehingga model yang digunakan adalah model *fixed effect*.

### b. Correlated Random Effect-Hausmann Test

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik digunakan daripada *fixed effect*.

$H_0$ : Random Effect

$H_a$ : Fixed Effect

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5%, maka sebaiknya model menggunakan *random effect*. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.664326	4	0.3235

Sumber : Eviews 8

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0,3235 sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan *random effect*.

### 3. Analisis Data Panel

Dari uji spesifikasi di atas, maka model sebaiknya menggunakan estimasi dengan *random effect*. Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak bias. Hasil estimasi model regresi data panel adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Estimasi Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.90005	0.879098	13.53666	0.0000
IHK	-0.002241	0.003721	-0.602117	0.5525
TPAK	-0.024393	0.007484	-3.259259	0.0032
LOG(PDRB)	-0.115096	0.026993	-4.263850	0.0003
LOG(UMP)	0.512724	0.040886	12.54046	0.0000

Sumber : Eviews 8

Dari hasil di atas diketahui probabilitas untuk variabel TPAK, PDRB, dan Pendapatan perkapita memiliki pengaruh signifikan dalam taraf error 5%, sedangkan untuk variabel IHK tidak memiliki pengaruh terhadap UMP karena memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05.

#### 4. Hasil Uji Hipotesis

##### a. Uji Simultan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *software Eviews 8*, diperoleh nilai probabilitas F sebesar 0,000001. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel IHK, TPAK, dan PDRB, dan Pendapatan per Kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penentuan nilai Upah Minimum Propinsi.

##### b. Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa TPAK, PDRB dan Pendapatan per Kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap UMP, sedangkan IHK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

###### 1) Pengaruh IHK terhadap nilai UMP di Pulau Jawa

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel IHK memiliki t-hitung sebesar -0.602117 dan probabilitas sebesar 0.5525. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel IHK secara individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai UMP di Pulau Jawa.

###### 2) Pengaruh TPAK terhadap nilai UMP di Pulau Jawa

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel TPAK memiliki t-hitung sebesar -3.259259 dan probabilitas sebesar 0.0032. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel TPAK secara individu memiliki

pengaruh secara signifikan terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar -0.024393 menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan TPAK 1%, akan menyebabkan penurunan nilai upah minimum propinsi sebesar 0.02%.

### 3) Pengaruh PDRB terhadap nilai UMP di Pulau Jawa

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki t-hitung sebesar -4.263850 dan probabilitas sebesar 0.0003. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi. Nilai koefisien regresi sebesar -0.115096 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan PDRB 1% akan menyebabkan penurunan nilai upah minimum propinsi sebesar 0.11%.

### 4) Pendapatan per Kapita

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan per Kapita memiliki t-hitung sebesar 12.54046 dan probabilitas sebesar 0.0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel Pendapatan per Kapita secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap Upah Minimum. Nilai koefisien regresi sebesar 0.512724 menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap nilai UMP di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan Pendapatan per Kapita 1% akan menyebabkan kenaikan nilai upah minimum propinsi sebesar

0.51%. Peningkatan pendapatan per kapita mampu menambah nilai Upah Minimum Propinsi. Ketika kemakmuran masyarakat meningkat, upah minimum juga akan ditingkatkan agar pekerja dapat hidup sejahtera.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* diperoleh angka sebesar 0.867289. Hal ini berarti bahwa kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 86.73%. Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## 5. Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis data panel pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IHK, TPAK, PDRB, dan Pendapatan per Kapita terhadap nilai UMP tahun 2010-2014. Dari hasil pengolahan data panel dengan metode *random effect* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LnMW}_{it} = 11.7877635 - 0.001628499\text{CPI} - 0.0238879\text{EMP} - 0.1140050\text{LnGDRP} + 0.5115224\text{LnIPC} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- Ln : Logaritma Natural
- MW : Upah Minimum Propinsi
- CPI : Indeks Harga Konsumen
- EMP : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- GDRP : Produk Regional Domestik Bruto
- IPC : Pendapatan per Kapita

Variabel-variabel bebas dalam model yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Harga Konsumen

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara individu variabel Indeks Harga Konsumen tidak berpengaruh terhadap Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Artinya, tinggi dan rendahnya Indeks Harga Konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap penetapan Upah Minimum Propinsi. Hal ini disebabkan karena pemerintah menggunakan Kebutuhan Hidup Layak daripada menggunakan Indeks Harga Konsumen sebagai standar upah minimum. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamada (2009) bahwa tingkat kenaikan rata-rata biaya hidup tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai upah minimum di Jepang, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Bersales (2014) menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Bersales (2014) menunjukkan bahwa variabel IHK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan upah minimum di Filipina.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase untuk menghitung partisipasi angkatan kerja. Nilai koefisien regresi TPAK sebesar -0.024393 menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan TPAK 1%, akan menyebabkan penurunan nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar 0.0024% pada periode 2010-2014. Peningkatan pada penawaran tenaga kerja akan mempengaruhi tingkat upah yang akan ditetapkan. Hal ini

dikarenakan upah akan selalu menyesuaikan diri dengan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih, akibatnya upah akan turun. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bersales (2014) dan Arnaud (2005) bahwa TPAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan nilai upah minimum.

c. Produk Domestik Regional Bruto

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel PDRB secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar -0.115096 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh negatif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi kenaikan PDRB 1% akan menyebabkan penurunan nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar 0.11% pada periode 2010-2014. Secara teoritis, PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Upah Minimum Propinsi. Ketika PDRB meningkat, UMP juga akan meningkat. Namun, dalam penelitian ini memiliki kasus yang berbeda. Nilai PDRB naik, tetapi tingkat upah akan turun, dan sebaliknya Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun. Hal ini terbukti pada saat menggunakan periode waktu selama tujuh tahun (lampiran. 7) PDRB berpengaruh positif meskipun tidak signifikan

terhadap nilai Upah Minimum Propinsi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Bersales (2014) yang menggunakan jangka waktu 22 tahun (1990-2012), dan Ilham Kristanto (2011) yang menggunakan jangka waktu 21 tahun (1990-2011) menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap nilai upah minimum.

d. Pendapatan per Kapita

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan per kapita baik secara individu maupun simultan signifikan dalam mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Nilai koefisien regresi sebesar 0.512724 menunjukkan bahwa pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa. Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan pendapatan per kapita 1% akan menyebabkan kenaikan Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa sebesar 0.51% pada periode 2010-2014. Peningkatan pendapatan per kapita mampu meningkatkan nilai Upah Minimum Propinsi. Hal ini dikarenakan tingkat upah akan menyesuaikan tingkat kemakmuran suatu daerah. Jika tingkat kemakmuran suatu daerah naik, maka tingkat upah juga akan naik. Pendapatan per kapita digunakan sebagai pedoman kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Upah Minimum Propinsi karena pendapatan per kapita ini menjadi indikator standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arnaud

(2005) bahwa Pendapatan per Kapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai upah minimum.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan nilai upah minimum di Pulau Jawa antara satu provinsi dengan provinsi lain. Rata-rata nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa paling tinggi ditempati oleh DKI Jakarta, dan paling rendah ditempati oleh Propinsi Jawa Tengah. Hampir semua Propinsi di Pulau Jawa menetapkan nilai Upah Minimum Propinsi di bawah nilai rata-rata Upah Minimum Propinsi Nasional.
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap Upah Minimum Propinsi karena penelitian ini hanya menggunakan jangka waktu yang pendek yaitu lima tahun, sementara penelitian lain menggunakan jangka waktu yang panjang, sekitar dua puluh tahunan, sedangkan untuk Pendapatan per Kapita berpengaruh positif terhadap nilai Upah Minimum Propinsi di Pulau Jawa.
3. Indeks Harga Konsumen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Produk Domestik Regional Bruto, dan Pendapatan per Kapita secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai Upah Minimum Propinsi. Perubahan yang terjadi pada nilai Upah Minimum Propinsi dijelaskan oleh variabel bebas

yang diteliti sebesar 86.73%. Sisanya sebesar 13.27% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## B. Saran

1. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan tentang upah minimum yang dapat diterima oleh pengusaha maupun buruh, sehingga tercipta hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha, dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang.
2. Adanya peningkatan penawaran tenaga kerja akan menurunkan tingkat upah, sehingga perlu digalakkan program kewirausahaan untuk mengurangi jumlah penawaran tenaga kerja.

## C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Periode waktu pengamatan hanya pendek, yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Dengan pengamatan tahunan, sehingga jumlah *time series* yang dianalisis hanya 5 tahun.
2. Penggunaan data *cross-section* yang relatif sedikit dikarenakan jumlah Propinsi di Pulau Jawa hanya sejumlah 6, sehingga jumlah observasi data panel hanya 30 observasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arnaud, Sebastien St. 2005. The Rise and Fall of Provincial Minimum Wages : Labor Movement, Business Interest and Partisan theory. *Sociological Journal*: USA. Department of Sociology, University of Toronto.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Indeks Harga Konsumen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Produk Domestik Regional Bruto*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Upah Minimum Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Upah Minimum Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Upah Minimum Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Upah Minimum Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Upah Minimum Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Bersales, Lisa Grace. 2014. Determinant of Regional Minimum Wage in the Philippines. *Statistics Journal: Philippines*. School of Statistics, University of the Philippines Diliman.
- Gujarati, Damodar N, Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fisher, Richard Startz. 2004. *Makroekonomi, Edisi Bahasa Indonesia*. Terjemahan Yusuf dan Roy Indra Mirazudin. PT. Media Global Edukasi: Jakarta.
- Ilham Kistanto. 2013. Analisis Penetapan Upah Minimum Kabupaten Jember. *Skripsi*: Jember. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Sofyan Yamin, Lien A. Rachmach, Heri Kurniawan. 2010. *Regresi dan Korelasi Aplikasi dengan Software SPSS, EVIEWS, MINITAB, dan STATGRAPHICS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iqbal Hasan. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum
- Mankiw, Gregory, Euston Quah, Peter Wilson. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mceachern, William. 2001. *Ekonomi Mikro*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ninda Noviani Charysa. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Upah Minimum Regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*. EDAJ 2(4): hal 277-285
- Sadono Sukirno. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. 2002. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro. Edisi ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Yamin, Lien, A Rachmach, Heri Kurniawan. 2011. *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tamada, Keiko. 2009. Analysis of Determinant of Minimum Wages in Japan. *The Japanese Journal of Labour Studies* 51, no 12: hal 16-28

UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan

Moch. Doddy Ariefianto. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1**  
**DATA PENELITIAN**

<b>TAHUN</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>UMP</b>	<b>IHK</b>	<b>TPAK</b>	<b>PDRB (Milyar)</b>	<b>Pendapatan per Kapita</b>
2010	DKI Jakarta	1118009	119.23	67.83	1075180.48	111528.9
	Banten	955300	121.97	65.34	271465.28	25397.65
	Jawa Barat	671500	117.66	62.38	906685.76	20974.94
	Jawa Tengah	660000	114.43	70.6	623224.62	19209.31
	Jawa Timur	630000	117.78	69.08	990648.84	26371.1
	DIY	745695	120.72	69.76	64678.97	18652.97
2011	DKI Jakarta	1290000	125.33	69.36	1147558.23	117672.9
	Banten	1000000	126.81	67.79	290545.84	26548.94
	Jawa Barat	732000	121.47	60.27	965622.06	21976.53
	Jawa Tengah	675000	118.86	70.77	656268.13	20053.8
	Jawa Timur	705000	123.76	69.49	1054401.77	27864.26
	DIY	808000	127.78	68.77	68049.87	19387.45
2012	DKI Jakarta	1529150	130.55	71.47	1222527.92	123962.4
	Banten	1042000	131.54	65.17	310385.59	27716.47
	Jawa Barat	780000	126.67	63.64	1028409.74	23036
	Jawa Tengah	765000	122.84	71.26	691343.12	20950.62
	Jawa Timur	745000	130.57	69.6	1124464.64	29508.4
	DIY	892660	132.74	71.37	71702.45	20183.88
2013	DKI Jakarta	2200000	139.39	67.79	1297195.43	130110.6
	Banten	1170000	141.27	63.55	332517.42	29034.51
	Jawa Barat	850000	134.98	62.82	1093585.51	24119.24
	Jawa Tengah	830000	131.3	70.43	726899.71	21852.22
	Jawa Timur	866250	139.45	69.78	1192841.86	31093.39
	DIY	947114	141.69	69.29	75637.01	21040.36
2014	DKI Jakarta	2441301	113.37	66.61	1374348.61	136407.6
	Banten	1325000	114.33	63.84	350699.73	29961.85
	Jawa Barat	1000000	111.9	62.77	1148948.82	24961.05
	Jawa Tengah	910000	110.04	69.68	766271.77	22858.32
	Jawa Timur	1000000	111.68	68.12	1262700.21	32703.8
	DIY	988500	112.51	71.05	79557.25	21873.72

**LAMPIRAN 2**  
**UJI CHOW**

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	6.036356	(5,20)	0.0015
Cross-section Chi-square	27.597591	5	0.0000

**LAMPIRAN 3**  
**UJI HAUSMAN**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.			Prob.
	Statistic	Chi-Sq.	d.f.	
Cross-section random	4.664326		4	0.3235

**LAMPIRAN 4**  
**HASIL REGRESI DATA PANEL**

Dependent Variable: Log(UMP)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/21/16 Time: 08:29

Sample: 2010 2014

Periods included: 5

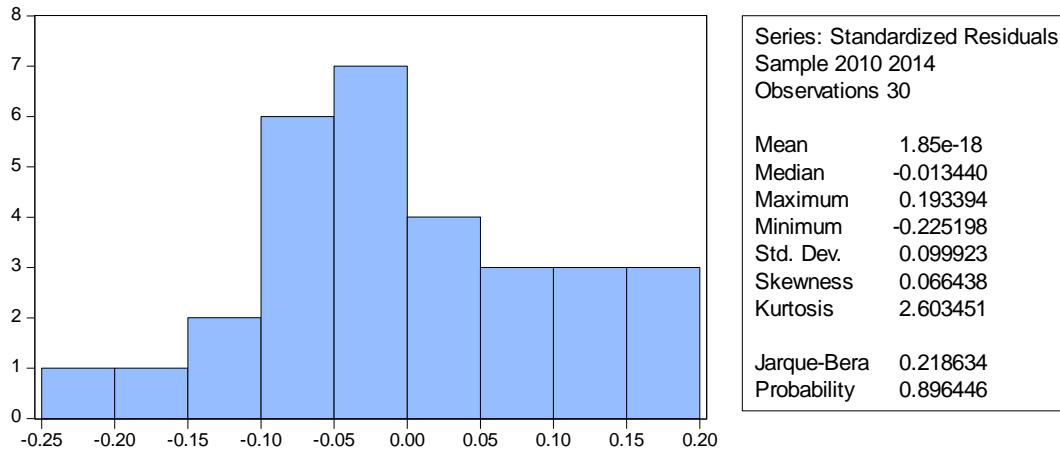
Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 30

Wansbeek and Kapteyn estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.90005	0.879098	13.53666	0.0000
IHK	-0.002241	0.003721	-0.602117	0.5525
TPAK	-0.024393	0.007484	-3.259259	0.0032
Log(PDRB)	-0.115096	0.026993	-4.263850	0.0003
Log(UMP)	0.512724	0.040886	12.54046	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.120658	0.5014
Idiosyncratic random			0.120324	0.4986
Weighted Statistics				
R-squared	0.867289	Mean dependent var	5.606667	
Adjusted R-squared	0.846055	S.D. dependent var	0.308188	
S.E. of regression	0.120920	Sum squared resid	0.365540	
F-statistic	40.84488	Durbin-Watson stat	1.960551	
Prob(F-statistic)	0.000000	Second-Stage SSR	0.365540	
Instrument rank	6	Prob(J-statistic)	0.000001	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.760317	Mean dependent var	13.76524	
Sum squared resid	0.739375	Durbin-Watson stat	0.984430	

**LAMPIRAN 5**  
**HASIL UJI NORMALITAS**



**LAMPIRAN 6**  
**HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS**

	IHK	TPAK	PDRB	IPC
IHK	1.000000	0.037915	-0.104232	0.066294
TPAK	0.037915	1.000000	-0.146582	0.106832
PDRB	-0.104232	-0.146582	1.000000	0.536779
IPC	0.066294	0.106832	0.536779	1.000000

**LAMPIRAN 7**  
**HASIL REGRESI DATA PANEL**  
**JANGKA WAKTU 7 TAHUN**

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Panel Least Squares

Date: 07/15/16 Time: 11:58

Sample: 2005 2011

Periods included: 7

Cross-sections included: 6

Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.71828	1.084727	11.72487	0.0000
X1	-1.28E-05	1.03E-05	-1.247133	0.2214
X2	-0.028689	0.012676	-2.263242	0.0305
LOG(X3)	0.016993	0.040871	0.415771	0.6804
LOG(X4)	0.283055	0.037229	7.603127	0.0000

---

Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.819642	Mean dependent var	13.36406
Adjusted R-squared	0.768916	S.D. dependent var	0.321752
S.E. of regression	0.154670	Akaike info criterion	-0.690790
Sum squared resid	0.765530	Schwarz criterion	-0.277059
Log likelihood	24.50658	Hannan-Quinn criter.	-0.539141
F-statistic	16.15828	Durbin-Watson stat	2.719258
Prob(F-statistic)	0.000000		

---